

**IMPLEMENTASI FUNGSI KOORDINASI CAMAT DALAM PEMBUATAN KARTU
KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK DI KECAMATAN DUMAI BARAT
KOTA DUMAI**

Oleh:

Rusli

Mahasiswa Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Riau-Indonesia

Nurman

Dosen Program Pascasarjana, Program Studi Magister Ilmu Administrasi
Universitas Islam Riau-Indonesia

Correspondence Author: nurman07@soc.uir.ac.id

Abstrak

Salah satu tugas Camat dalam bidang pemerintahan adalah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang berkaitan erat terhadap pelayanan masyarakat yaitu pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan dokumen warga Negara yang wajib sebagai warga Negara yang baik dan benar. Permasalahan dalam pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai yaitu seringkali terjadi keluhan masyarakat terhadap keterlambatan pembuatan KK dan KTP, selanjutnya tingginya biaya pembuatan KK dan KTP dan juga persyaratan KK dan KTP yang banyak belum ketahui oleh masyarakat, serta terjadinya kerusakan jaringan, matinya aliran listrik dan kerusakan perangkat komputer. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Informan yang dijadikan objek kajian dari penelitian ini adalah Camat Dumai Barat, Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai, Kabid Data dan Informasi Kependudukan pada Badukcapil Kota Dumai, Kasi Pemerintahan Kecamatan Dumai Barat, Petugas Operator KK dan KTP Kecamatan Dumai Barat dan masyarakat yang mengurus KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan literatur kepustakaan, melakukan observasi dan pengamatan langsung terhadap objek kajian serta melakukan wawancara secara *face to face* dengan informan penelitian yang didasari empat indikator penelitian yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan Struktur Birokrasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Sistem di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai dari hasil penelitian dengan empat indikator diatas belum terlaksana dengan baik.

Keyword: Implementasi, Fungsi, Koordinasi Camat

PENDAHULUAN

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan dimana pada pasal 1 dibunyikan bahwa camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Selanjutnya pada pasal 14 ayat 1 berbunyi kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh

camat. Pada Bab IV tentang Kedudukan, Tugas dan Wewenang Pasal 15 ayat 1 dijelaskan bahwa Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi pada poin (e) yaitu mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Sebagai pemimpin di kecamatan, seorang camat harus mempunyai sejumlah kemampuan tertentu. Seseorang pemimpin melaksanakan manajemen pemerintahan harus memiliki kemampuan manajerial yaitu kemampuan untuk memanfaatkan dan menggerakkan sumber daya yang ada agar dapat digerakkan dan diarahkan bagi tercapainya tujuan melalui kegiatan orang lain serta mempunyai kemampuan leadership yaitu kemampuan untuk memimpin, mempengaruhi, mengarahkan agar timbulnya pengakuan, kepatuhan, ketaatan serta memiliki kemampuan dan kesadaran untuk melakukan suatu kegiatan mengambil langkah –langkah bagi tercapainya suatu tujuan.¹

Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 13 Tahun 2005 bahwa Kecamatan Dumai Barat ditunjuk untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dalam pembuatan KK dan KTP , dimana penanggung jawab teknis oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai. Kecamatan Dumai Barat sebagai instansi yang berwenang untuk menerbitkan KTP, guna untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, tentunya harus menyiapkan sarana dan prasarana serta tenaga teknis untuk pengoperasiannya, dengan tenaga teknis yang professional tentunya dapat mengaplikasikan dan menjalankan program dengan baik.

Pelaksanaan pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat terdapat beberapa permasalahan yang menghambat kelancaran pengoperasian program KTP , seperti seringnya kerusakan system, kerusakan jaringan, kerusakan perangkat dan juga dikarenakan keterlambatan dalam pendistribusian peralatan seperti blanko KK dan KTP yang terkadang tidak adanya stok di Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai atau keterlambatan menginformasikan dari Kecamatan Dumai Barat terhadap kekurangan alat untuk pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat.

Dari uraian diatas, penulis melihat ada beberapa persoalan di Kecamatan Dumai Barat yang menjadi perhatian dalam menjalankan fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan pada Pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan Dumai Barat sebagai berikut :

1. Terdapatnya keterlambatan dalam Pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat yang didalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2007, KTP dan KK siap paing lambat selama 14 hari, namun kenyataan penyelesaian KTP di Kecamatan Dumai Barat hampir sampai 20 hari.
2. Terdapatnya penambahan biaya penggantian cetak KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat, dimana biaya yang dikeluarkan untuk KK sebesar Rp. 15.000,- dan untuk biaya KTP sebesar Rp. 10.000,-, dimana didalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2011 pada Lampirannya Poin B untuk biaya cetak KK sebesar Rp. 10.000,- dan biaya untuk KTP sebesar Rp. 6.000,-
3. Terdapatnya keluhan masyarakat yang telah mengurus KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat, yang tidak bisa diproses dikarenakan kurangnya persyaratan yang sebelumnya sudah dilakukan verifikasi oleh petugas kecamatan, namun dipermasalahkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai, sehingga masyarakat harus mengulang kembali dan melengkapi syarat yang diinginkan.

¹ Dharma Setyawan Salam, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta; Penerbit Djambatan, 2002).

4. Terdapatnya permasalahan teknis dalam pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat seperti matinya aliran listrik, tidak adanya jaringan, dan rusaknya perangkat computer ataupun printer, sehingga memperlambat proses pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat

Dari fenomena-fenomena diatas, kiranya dapat mewakili dari dasar untuk melakukan penelitian ini. Berdasarkan beberapa permasalahan yang dikemukakan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai.

KERANGKA TEORI

Konsep Pemerintahan

Secara etimologi pemerintahan berasal dari kata "pemerintah" yang kemudian mendapat imbuhan, awalan "pe" menjadi kata "pemerintah" berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengatur dan mengurus dalam suatu negara, dan mendapat akhiran "an" menjadi kata "pemerintahan" berarti perihal, cara, perbuatan, atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi tersebut.

Dan menurut Kencana, Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintah (baik pusat dengan daerah, maupun antara rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.²

Dalam tulisannya Rasyid menyimpulkan bahwa pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, memobilisasi semua sumber daya yang diperlukan, serta membina hubungan baik di dalam lingkungan negara ataupun dengan negara lain. Ditingkat lokal tentu saja membina hubungan dengan pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah yang lainnya³.

Konsep Organisasi

Menurut Luther Gulick Organisasi adalah sebagai suatu alat saling berhubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah dari para atasan kepada bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha.

Lebih lanjut disimpulkan oleh Inu Kencana Syafii bahwa organisasi merupakan wadah atau tempat terselenggaranya administrasi, didalamnya terjadi berbagai hubungan atas individu maupun kelompok baik dari organisasi itu sendiri maupun ke luar organisasi, terjadi proses dan pembagian tugas, berlangsungnya proses aktivitas berdasarkan kinerja masing-masing. Maka keorganisasian dapat diartikan :

1. Bagaimana sifat sebuah bentuk setiap perserikatan orang-orang untuk pencapaian suatu tujuan bersama.

² Syafii, Inu Kencana, Manajemen Pemerintahan. PT.Perca, Jakarta, 2007, hal 17

³ Rasyid, Ryas, et al, , *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Jakarta, Pustaka Pelajar, 2007), hal. 223

2. Bagaimana sifat sebuah bentuk kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama.
3. Bagaimana sifat sebuah bentuk pola komunikasi yang lengkap dan hubungan-hubungan lain didalam suatu kelompok orang-orang.⁴

Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Dye adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukannya. Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Sebagai contoh, ketika pemerintah mengetahui jalan itu rusak dan pemerintah tidak membuat kebijakan memperbaikinya berarti pemerintah sudah mengambil kebijakan. Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa :

1. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta.
2. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor diluar pemerintah.⁵

Anderson mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor diluar pemerintah.⁶

Konsep Implementasi

Implementasi kebijakan adalah satu aktivitas dari kegiatan administrasi sebagai suatu institusi dimaksudkan sebagai salah satu proses kegiatan yang dilakukan oleh unit administratif atau unit birokratik.⁷ Implementasi program pemerintah dapat dipandang dari tiga sudut yang berbeda yaitu pertama, pemrakarsa kebijaksanaan/pembuat kebijaksanaan, kedua, pejabat-pejabat pelaksana dilapangan dan yang ketiga, actor-aktor perorangan diluar badan-badan pemerintahan kepada siapa program itu dituju, yakni kelompok sasaran (target group).⁸

Implementasi Kebijakan Publik Model George C. Edward III menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang diteorematkan oleh Edward III, terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu, (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) Disposisi dan (4) Struktur birokrasi,

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik dengan tiga indikator yang dipakai dalam mengukur keberhasilan yaitu Trasmisi, Kejelasan dan Konsistensi, sedangkan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumberdaya dengan indikator penilaian yaitu staf, informasi, wewenang dan fasilitas, selanjutnya variabel disposisi atau sikap dari pelaksana

⁴ Syaifi, Inu Kencana. Ilmu Pemerintahan. 2011. Bandung. Pustaka Reka Cipta. Hal 12.

⁵ Subarsono, Ag. Analisa Kebijakan Publik, 2008. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hal.. 3

⁶ Ibid. 2008. Hal. 3

⁷ Awang, Azam, Implementasi pemberdayaan Pemerintah Desa, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.Hal.25

⁸ Sumaryadi Nyoman, 2005, Ibid. hal 80

kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik dengan hal-hal penting yang perlu dicermati untuk penilaian yaitu pengangkatan birokrat dan Insentif. Variabel selanjutnya yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi yang menurut Edward III dapat mendongkrak kinerja birokrasi kearah yang lebih baik adalah melakukan *Standar Operating Prosedures (SOPs)* dan melaksanakan *Fragmentasi*.⁹

Konsep Manajemen Pemerintahan

Menurut Ndraha manajemen mempelajari bagaimana menciptakan *effectiveness* usaha (”*doing right things*”) secara *efficient* (”*doing things right*”) dan produktif, melalui fungsi siklus tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan. Jadi unsur-unsur manajemen adalah :

1. Tujuan organisasional yang telah ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang berkompeten.
2. Fungsi, yaitu perencanaan usaha termasuk pemantapan *output* dan *out-come* yang dikehendaki, pengorganisasian sumber-sumber agar siap pakai/gerak, penggerak/pengguna sumber-sumber supaya *output* dan *outcome* yang dihasilkan/ dinikmati konsumen sesuai dengan *output/outcome* yang diharapkan.
3. Siklus produk yang berawal dari konsumen, dan setelah melalui beberapa rute, berakhir pada konsumen.¹⁰

Menurut Prajudi, manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan dari pada semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu tujuan kerja tertentu.¹¹ Manajemen menunjukkan fungsi-fungsi yang perlu dijalankan (dioperasionalkan) terus menerus dan berturut-turut, untuk mencapai suatu nilai yang disebut efektivitas, efesiensi, dan produktivitas. Ruang lingkup Manajemen Pemerintahan terlihat melalui fungsi-fungsi manajemen:

1. Perencanaan pemerintahan.
2. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan.
3. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan.
4. Kontrol pemerintahan.¹²

Konsep Koordinasi

Ndraha mengatakan bahwa koordinasi (*coordinating, coordination*) diartikan sebagai proses pembangunan kinerja sendiri tanpa merusak kinerja unitkerja yang lain. Koordinasi adalah pembangunan komitmen bersama antar unit kerja yang berbeda-beda dalam satu wilayah, agar yang satu tidak merugikan tetapi mendukung yang lain, dalam rangka mencapai kinerja masing-masing unit kerja secara optimal sebagai bagian pencapaian tujuan bersama secara keseluruhan. Koordinasi merupakan salah satu urusan pemerintahan umum dan juga merupakan salah satu tugas umum pemerintahan. Semakin indenpenden hubungan antar unit organisasi yang satu dengan unit

⁹ Leo Agustino, 2008, *ibid*, hal. 149

¹⁰ Ndraha, Taliziduhu, *Kybernolog (Ilmu Pemerintahan Baru)*, (Jakarta, Rineka Cipta 2003), hal. 159

¹¹ Atmosudirjo, Prajudi. *Administrasi dan Management Umum*. Ghalia Indonesia, Jakarta 1982, hlm. 124.

¹² Ndraha Taliziduhu, 2003. *Op.cit* Hal. 160.

kerja lain, semakin diperlukan koordinasi. Koordinasi merupakan sebuah proses yang inputnya informasi, dan outputnya kesepakatan yang mengikat pihak-pihak (pejabat) yang berkoordinasi.¹³

Menurut Fayol, mengkoordinasi berarti mengikat bersama, menyatukan dan menyelaraskan semua kegiatan dan usaha. Menurut Terry, koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha untuk menciptakan pengaturan waktu dan terpimpin, dalam hasil pelaksanaan yang harmonis dan bersatu untuk menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian unsur-unsur koordinasi bagi Terry adalah sebagai berikut:

1. Usaha-usaha sinkronisasi yang teratur.
2. Pengaturan waktu dan terpimpin.
3. Harmonis.
4. Tujuan yang ditetapkan.¹⁴

Koordinasi merupakan penyesuaian satu sama lain dari berbagai kesatuan sehubungan dengan aktivitas-aktivitas masing-masing disatu bidang tertentu. Ada berbagai macam koordinasi yakni koordinasi kebudayaan, struktural dan instrumental. Hal-hal ini berturut-turut berkenaan dengan pendirian-pendirian, kedudukan-kedudukan dan instrument-instrument atau sarana-sarana.¹⁵

METODE PENELITIAN

Aspek sosial yang dikaji dalam penelitian ini adalah organisasi pemerintah dalam hal ini implementasi fungsi koordinasi Camat, dan kepuasan masyarakat yang dilihat dari tingkat pelayanan publik yang dilakukan oleh kecamatan yang menyangkut indikator-indikator implementasi yang dalam hal ini peneliti mengkaji proses implementasi fungsi koordinasi Camat dalam pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. Rujukan yang digunakan sebagai tinjauan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan. Rujukan ini penting untuk mengkorelasikan antara apa yang sudah peneliti amati dilapangan dengan landasan normatif untuk mendapatkan kesimpulan tentang kajian yang diteliti. Penelitian ini adalah penelitian dengan metode Kualitatif. Istilah penelitian Kualitatif menurut David Williams menulis bahwa penelitian Kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.

Desain penelitian yang dilakukan ini adalah *deskriptif kualitatif* dengan tinjauan normatif. Deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, menguraikan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realita ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu¹⁶. Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada

¹³ Ndraha Taliziduhu, *Kybernologi 2015.2011*. Sirao Credentia Center. Tangerang. Hal. 73.

¹⁴ Syafie, Inu Kencana, *Op.Cit.* hal 41-43

¹⁵ Hoogerwerf, A. *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta, Penerbit Erlangga, 1978), Hal. 521

¹⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group 2007), hal.68

penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel.¹⁷ Menurut Bagung Suyanti informan penelitian meliputi beberapa macam yaitu:

1. Informan Kunci (*Key Informan*) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian,
2. Informan Utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti,
3. Informan Tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.¹⁸

Metode pengumpulan data yang digunakan antara lain adalah :

1. Dokumentasi, untuk mengumpulkan data primer dan sekunder, penulis menganalisa dokumen-dokumen dalam bentuk tulisan, Tape Recorder, Camera.
2. Observasi, untuk memperoleh informasi serta gambaran empirik tentang data-data yang diperlukan dengan mengadakan pengamatan langsung pada obyek penelitian.
3. Wawancara, adalah percakapan langsung dengan *Key Informant* untuk memperkuat data sekunder yang diperlukan dalam penelitian.

Dalam penelitian kualitatif data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Model pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Model Interactive dan Miles and Huberman yaitu analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.¹⁹

PEMBAHASAN

Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kantor Camat Dumai Barat Kota Dumai.

Yang menjadi fokus dari kajian penulis dalam penelitian ini adalah Implementasi fungsi koordinasi Camat dalam pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, kajian ini perlu dilakukan penulis untuk mengetahui bagaimana implementasi fungsi koordinasi Camat serta faktor apa saja yang menjadi rintangan dan keberhasilan dalam implementasi fungsi koordinasi camat dalam pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat yang penulis jadikan kajian penelitian antara lain meliputi :

1. Faktor Komunikasi
2. Faktor Sumberdaya
3. Faktor Disposisi
4. Faktor Struktur Birokrasi.

¹⁷ Suyanto Bagong, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif*, 2005, Prenada Media, Jakarta, hal 171

¹⁸ Suyanto Bagong, *ibid*, 2005, hal 172.

¹⁹ Mattew, Mile B. and Michael A. Huberman, 1992, *Analisa Data Kualitatif*, Buku Sumber Tentang Metode-metode baru (edisi terjemahan oleh Tjeptjep Tohendi Rohidi), Jakarta, UI Press.

Faktor Komunikasi

Keberhasilan dari suatu Implementasi sebuah kebijakan sangat dipengaruhi oleh komunikasi, terukurnya pencapaian tujuan dari implementasi suatu kebijakan publik yang efektif itu terjadi apabila para pembuat kebijakan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan apabila komunikasi dapat berjalan dengan baik. Komunikasi (transmisi komunikasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dari para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Menurut Van Metter dan Van Horn.²⁰

Sumber Daya

Suatu kebijakan yang tidak didukung oleh sumberdaya dan dana yang memadai sulit merealisasikan tujuan dari suatu kebijakan publik. Biaya sangat mempengaruhi pelaksanaan secara ekonomis dan teknologi yang dibutuhkan. Suatu organisasi dituntut melakukan pengorbanan dengan biaya yang tinggi baik langsung maupun tidak langsung yang merefleksikan output atau keluaran yang punya nilai. Selanjutnya bagaimana organisasi mampu mentransformasi teknologi seiring dengan memaksimalkan sumberdaya yang ada pada organisasi tersebut. Pegawai atau aparatur yang berkualitas yang punya kompetensi nilai. Menurut Van Metter dan Van Horn".²¹

Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah factor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan public, jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga prakteknya tidak terjadi bisa.²²

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standard an tujuan kebijakan adalah penting, karena bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil bisa jadi gagal (*frustrated*) ketika para pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standard an tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementor*) terhadap standard dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang *crucial*. Impelementor mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan kebijakan.²³

Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu institusi yang paing sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan, keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, isntitusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Ripley dan Franklin dalam Winarno mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu :

- a. Birokrasi diciptakan sebagai instrument dalam menangani keperluan-keperluan public (*public affair*).
- b. Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan public yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
- c. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.

²⁰ Agustino, Leo, 2008, *Dasar-dasar kebijakan publik*, alfabetha, Bandung, Hlm : 144

²¹ Agustino, Leo, 2008, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, Hlm:142

²² Agustino, Leo, 2008, *Dasar-dasar kebijakan publik*, alfabetha, Bandung, hal. 152

²³ ibid

- d. Fungsi birokrasi dalam lingkungan yang kompleks dan luas
- e. Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
- f. Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak, ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan.²⁴ Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kependudukan berdasarkan indikator komunikasi belum terimplementasi dengan baik, karena dari ketiga sub indicator yang dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penelitian dimana hasil wawancara belum berjalan dengan baik, karena masih kurangnya komunikasi dalam pembuatan KK dan KTP, dan kurangnya kejelasan komunikasi dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada petugas dan masyarakat serta kurangnya konsistensi komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan pembuatan KK dan KTP.

Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat berdasarkan indikator Sumber Daya belum terimplementasi dengan baik, dimana dilihat dari ketiga sub indicator yaitu dari jumlah petugas, dimana petugas dalam pembuatan KK dan KTP masih kurang dimana terdapat tiga perangkat computer dan tenaga yang diberikan pelatihan hanya sekitar dua orang, selanjutnya pada fasilitas dalam pembuatan KK dan KTP juga masih belum memadai, dimana masih terdapat hambatan dalam pembuatan KK dan KTP karena kerusakan perangkat computer, dan juga tidak adanya lemari arsip sehingga menyulitkan petugas untuk menyusun dan menata berkas-berkas agar tetap rapi dan tidak bertukar, dan pada indicator ini hanya kemampuan petugas yang sudah terlaksana dengan baik, karena mereka ditugaskan berdasarkan kemampuan dan keahliannya.

Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat berdasarkan indikator Disposisi belum terimplementasi dengan baik, karena dari ketiga sub indicator dimana sub indicator sikap petugas masih belum terlaksana dengan baik, karena masih ditemui petugas yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga memperlambat proses pembuatan KK dan KTP dan juga kurangnya komitmen petugas KK dan KTP dimana kurangnya tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dengan baik dalam pembuatan KK dan KTP sehingga tidak terjadi keterlambatan.

Implementasi Fungsi Koordinasi Camat dalam Pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat berdasarkan indikator Struktur Birokrasi belum terimplementasi dengan baik, dimana dari dua sub indikator yang dijadikan dasar penelitian yaitu Standar Operasional Prosedur belum dilaksanakan sepenuhnya oleh petugas dan belum dilaksanakan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat dan petugas pembuat KK dan KTP, sehingga masih ditemui petugas yang tidak mengetahui SOP yang telah dibuat, serta tidak adanya pembuatan struktur petugas dan uraian tugas yang bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing, sehingga dengan demikian persoalan KK dan KTP tidak dengan cepat diselesaikan dan dicarikan solusinya.

²⁴ Winarno. B. 2005, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Jogjakarta, Media Pressindo, Hal: 149-160.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Faktor Pendukung dalam Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan serta berdasarkan informasi dari para responden mengenai factor-faktor yang menjadi pendukung dalam implementasi fungsi koordinasi Camat dalam pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai sebagai berikut:

1. Mudahnnya melaksanakan hubungan komunikasi dengan pemanfaatan teknologi canggih seperti Handphone, saluran telepon dan komunikasi melalui via internet, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lancar dan mudah menyampaikan informasi terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat.
2. Adanya dukungan dari masing-masing petugas dalam pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat, dimana masing-masing petugas telah mempunyai keterampilan dan keahlian dalam pengoperasian computer, sehingga dengan mudah untuk menjalankan program dalam pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat.
3. Mudahnnya melaksanakan pengarahan dan pengawasan kinerja petugas karena sudah ada Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan, sehingga mempermudah jalannya kegiatan dalam pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat.

Sedangkan faktor penghambat dalam implementasi fungsi koordinasi Camat dalam pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat sebagaimana hasil penelitian dengan melakukan wawancara terhadap key informan, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Kurangnya pembangunan komunikasi dalam melaksanakan kegiatan pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat, dimana rangkaian kegiatan yang akan mendukung dan melancarkan pelaksanaan pembuatan KK dan KTP kurang terlaksana, dan juga kurangnya mengkomunikasikan permasalahan-permasalahan yang menimbulkan keterlambatan KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat.
2. Minimnya sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran dalam pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat seperti pengadaan lemari arsip, AC, Kipas Angin, Meja Kerja, Kursi Kerja, dimana sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dalam jangka waktu yang segera, dimana untuk pemenuhan kebutuhan tersebut harus diusulkan dalam penganggaran APBD, yang tentunya memerlukan jangka waktu yang lama.
3. Kurangnya memberikan pelatihan dan pendidikan kepada petugas dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan dan sikap petugas untuk kelancaran pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat.
4. Kurangnya sosialisasi terhadap Standar Operasional pelayanan kepada masyarakat dan petugas, sehingga implementasi tidak terlaksana dengan.

KESIMPULAN

Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai secara keseluruhan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan belum terimplementasi dengan baik. Faktor pendukung dalam implementasi fungsi koordinasi camat dalam pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat dimana mudahnnya membangun komunikasi dengan teknologi canggih saat ini, dan juga adanya dukungan petugas serta mudahnnya melakukan komunikasi kebawah karena adanya uraian tugas yang jelas dalam melaksanakan kegiatan, selanjutnya factor penghambatnya dimana kurangnya pembangunan komunikasi dan

kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan dalam implementasi fungsi koordinasi camat dalam pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat.

Adapun saran dalam penelitian ini adalah: 1) Kiranya camat perlu membangun komunikasi dengan baik dan terencana untuk melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai dengan mengadakan rapat evaluasi rapat teknis yang dilaksanakan secara berkala dan terencana dalam upaya untuk memperlancar kegiatan KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat, dan juga perlu dilaksanakan komunikasi aktif baik dalam bentuk laporan atau rapat staf yang dilaksanakan secara intensif jika terdapat permasalahan-permasalahan dalam pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat. 2) Kelengkapan sarana dan prasarana dalam pembuatan KK dan KTP sangat mempengaruhi kelancarannya, maka perlu dilaksanakan pengusulan dan pengadaan baik melalui kecamatan ataupun Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai. 3) Perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi terhadap sikap petugas, motivasi petugas dan konsekuensi petugas pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat agar kiranya dapat bertugas secara maksimal dalam pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat. Dan juga perlunya dilaksanakan secara berkala pendidikan dan pelatihan terhadap petugas untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan guna untuk memperlancar dalam proses pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Dumai Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, Tatang. M. 2000. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asep, Muslim. 2008. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Kecamatan, Desa, dan Kelurahan*. Bandung : Fokus Media.
- Awang, Azam. 2010. *Implementasi pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dahri, M. (2011). *Upaya publik relationtiens internasional menarik minat belanja distributor di Banner Store* (Doctoral dissertation, IAIN Sunan Ampel Surabaya).
- Doni, D., Yogia, M. A., Wedayanti, M. D., & Purwati, A. A. (2021, February). The Effect of Leadership and Incentives on Employee Performance of Market Retribution. In *2nd International Conference on Social Sciences Education (ICSSE 2020)* (pp. 167-171). Atlantis Press.
- Doni, D., Yogia, M. A., & Wedayanti, A. A. P. M. D. (2021, January). Management of Market Pelita Retribution In Bangko District In Increasing Original Revenue of Rokan Hilir Regency. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 41). European Alliance for Innovation.
- di Keamatan, M. P. N. S., & Hulu, S. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa.
- Gaspersz Vicent. 2002. *Manajemen Kualitas Dalam Industri Jasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Hidayah, S. M., & Riauan, M. A. I. (2021). Analisis Framing Kebijakan Pemerintah Tetang Rencana Pembelajaran Tatap Muka Di Media Online Cnn Indonesia. *Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi*, 9(2), 167-184.

- Ispik, A., Yogias, M. A., Purwati, A. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, M. L. H. (2021). Analysis of Benefits, Discipline and Leadership Style in improving Employee Performance of the Ministry of Religion in Pekanbaru, Indonesia.
- Ispik, A., Yogias, M. A., Wedayanti, M. D., & Purwati, A. A. (2021, February). The Role of Organizational Culture on Employee Satisfaction and Performance. In *The 2nd International Conference on Social Sciences Education (ICSSE 2020)* (pp. 270-275). Atlantis Press.
- Ispik, A., Yogias, M. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, Z. (2021). The Influence of Discipline on Performance of Employees Office of the Ministry of Religion, Pekanbaru City.
- Leo Agustino, 2008, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta
- Moehir. HAS. 1996. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit LAN RI.
- Maleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru I*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Qurniawati, E. F., & Riauan, M. A. I. (2015). Analisis Framing Pencitraan Pariwisata Indonesia pada Majalah Penerbangan Linker. *Editor*, 12, 219.
- Rasyid, M. Ryaas. 2007. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Riauan, M. A. I., Aziz, A., & Nurman, N. (2020). Analisis Framing " Aksi Bela Islam" sebagai Dakwah Islam di Riau Pos (A Framing Analysis of " Islam Defense Action" as Islamic Dakwah on Riau Pos Newspaper). *Jurnal Dakwah Risalah*, 31(1), 35-47.
- Riauan, M. A. I., Qurniawati, E. F., Aslinda, C., & Aziz, A. (2020). Konstruksi Realitas Pada Pesan Politik Calon Walikota Pekanbaru di Riau Pos. *ETTISAL: Journal of Communication*, 5(1).
- Riauan, M. A. I., & Sari, G. G. (2018). Konsep Diri Perokok di Universitas Islam Riau. *Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi*, 6(2), 27-38.
- Riauan, M. A. I., & Shasrini, T. (2017). Dampak Komunikasi Terapeutik terhadap Citra Pelayanan Kesehatan (Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru). *Jurnal The Messenger*, 9(1), 31-43.
- Riauan, M. A. I. (2013). Penggunaan Teknologi Komunikasi dalam Penerapan Good Governance. *Jurnal Kajian Pemerintahan*, 2(2), 102-107.
- Salam, Dharma Setyawan, 2002. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Santoso Gempur. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Sari, G. G., Wirman, W., & Riauan, M. A. (2018). Pergeseran Makna Tradisi Bakar Tongkang Bagi Generasi Muda Tionghua di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
- Soehartono, Irawan. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono, Ag. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, Bandung.
- Sumaryadi. I, Nyoman. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Jakarta: Citra Utama.

- Supriady, Dedy, Bratakusumah, Dadang Solihin. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suwaroyo, H. U., & Redjo, H. S. I. (2018). Transformasi Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Hutan Tanaman Industri Bagi Swasta Di Provinsi Riau Tahun 2010-2015.
- Wahab, Solihin Abdul Wahab. 2008. *Pengantar Analisis kebijakan public*. Malang: UMM Press.
- Wasistiono, Sadu. 2005. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Wasistiono, Sadu., Ismail Nuridin, M. Fahrurrozi. 2009. *Perkembangan Organisasi Kecamatan dari masa ke masa*. Bandung: FOKUSMEDIA.
- Widjaja, A. W. 2000. *Ilmu Komunika*s. Jakarta. Rineka Cipta.
- Winarno. B. 2005, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Jogjakarta, Media Pressindo.
- Yogia, A. S. M. A., Rahman, Z. M. D. W. K., & Purwati, A. A. (2021). Leadership of Tourism and Culture Department in Development of Cultural Reserves at District Kuantan Singingi.
- Yuza, A. F. (2014). Policy Dynamics on Subdistricts and Various Post-Reformation Implications.
- Zainal, Z., Rambey, R. R., & Rahman, K. (2021). Governance of Household Waste Management in Pekanbaru City. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 37(2).